

R I N G K A S A N

Penelitian ini bermaksud untuk menggali kembali data proses terjadinya penetrasi kapital berupa pemberian kredit (baik paket maupun parsial) motorisasi pada masyarakat nelayan lepas pantai di Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Kalau peneliti terdahulu lebih banyak mengamati hubungan teknologi dengan pemberdayaan nelayan tangkap, maka pada penelitian ini fokus amatan ditujukan pada pengaruh penetrasi kapital itu sendiri terhadap proses politik lokal.

Dalam realitanya, pelaksanaan suatu kebijakan (motorisasi) tidak terlepas dari pihak yang pro dan kontra, baik yang datang dari individu nelayan, pemuka masyarakat/tokoh informal maupun para birokrat yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan dimaksud. Untuk itu peneliti lebih banyak mengupas proses politik lokal (interaksi antara lembaga formal, lembaga informal, dengan nelayan baik secara kelompok maupun individu) dalam menyelesaikan permasalahan di atas.

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan tidak langsung (dengan bantuan orang lain yang peneliti telah kenal dengan baik) pada beberapa nelayan yang telah memanfaatkan modernisasi (baik secara swadaya maupun yang mendapatkan fasilitas kredit dari pemerintah). Dengan menggunakan teknik purposive sampling, informasi yang telah diperoleh tersebut kemudian dilakukan cross analisis dengan para tokoh masyarakat yang menjadi panutan nelayan dan pejabat formal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan studi pustaka sebagai upaya penggalan data, untuk kemudian dianalisa dengan cara mengkategorikan informasi pada proses politik dan pada proses masuknya kapital. Dari sinilah kemudian dibuat indikator-indikator yang diambil dari teori materialisme dialektikan dan teori konflik yang menjadi landasan berfikir peneliti.

Penetrasi kapital yang sudah berlangsung selama lebih dari 16 tahun ini telah mengakibatkan terjadinya pergeseran stratifikasi masyarakat nelayan yang dipicu

oleh munculnya peran-peran baru dalam proses produksi dan bergesernya pola hubungan antara juragan dengan *pandega* dari yang bercirikan *patron-client* ke arah yang lebih bersifat rasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kompetisi yang tidak sehat diantara para nelayan yang berkeinginan mendapatkan kredit. Nelayan yang tidak mengerti "jalan pintas" untuk memperoleh kapital, maka dia tidak akan pernah dapat menikmati kapital dimaksud, sebab realitas menampakkan hanya nelayan yang mengerti dan memanfaatkan "jalan pintas" saja yang dapat menikmati kapital (perbandingan antara bagan 3 dan bagan 4). Keadaan inilah yang memicu lahirnya konflik baru ditengah-tengah nelayan.

Konflik tersebut dipertajam oleh ulah birokrat yang duduk dalam KUD dan HNSI dengan membuat kebijakan retribusi yang dirasakan begitu "membelit" kebebasan dan penghasilan nelayan. Manakala konflik yang melibatkan antara nelayan (*pandega* dengan *pandega*; *pandega* dengan juragan; dan juragan dengan juragan) dapat diselesaikan dengan menghadirkan tokoh masyarakat informal yang mereka segani (yang memiliki kedalaman pengetahuan dalam hal agama

Islam), maka konflik antara nelayan dengan lembaga formal yang sudah lama terpendam (*latent* menjadi *manifest*) baru dapat diselesaikan lewat cara-cara yang bersifat "anarkis".

Secara teoritis penelitian ini menemukan suatu tesis, bahwa penetrasi kapital yang sudah berlangsung di Brondong telah melahirkan terbentuknya pola-pola hubungan yang bersifat rasional. Dimana rasionalitas tersebut dapat mendorong kemampuan nelayan untuk mengambil "posisi" dalam melakukan bargaining dalam proses politik sebagai upaya meng"goal"kan kepentingannya.

Dengan demikian penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis mempertajam kelemahan konsep-konsep kunci dalam teori materialisme dialektika.

A B S T R A C T

This thesis intends to reexplore data explaining the nature of capital penetration in the form of motorizing credit provision (either packet or partial) to offshore-fisherman community in Brondong subdistrict, Lamongan, East Java. Instead of observing technological relationship with their empowerment as many previous researches did, the main focus of this thesis is on capital penetration influence itself on local political process.

In reality, a policy implementation (motorization) related to those pros and cons, involving either individual fisherman, informal figures or bureaucrats related to policy implementation in question. As such the writer in great extent explores local political process (interaction between formal institutions, informal institutions, and fishermen both in group and individual) in solving the problem noted above.

In order to collect information, the writer compile data by doing direct and indirect interviews (with the help of already familiar intermediaries) on several fishermen who have applied modernization (both indepen-

dently and with governmental credit facility). By means of purposive sampling technique, cross analysis is done to the information with social figures commonly respected by those fishermen, and formal officers related to object of the study.

The writer also makes observation and library research to accomodate data exploration, which is later analyzed by categorizing information on political process and capital penetration. Some indicators taken from dialectical materialism theory and conflict theory which are actually the base of writer's way of thought are then made.

Capital penetration which has been existed for 16 years has caused the fishermen community stratification movement triggered by the emergence of new roles in production process and the relation pattern movement between employers and crew from its patron-client characteristic to a more rational one.

The final result demonstrates an unhealthy competition among fishermen with credit orientation. Only those fishermen who know the shortcut ways to realize it really make it possible. It is the condition triggering the emergence of new conflicts among fishermen.

This conflict is made worse by bureaucrats in KUD and HNSI who make retribution policy which further narrow the fishermen's freedom and incomes. Once the conflict among fishermen can be settled by involving informal respected figure, can be solved by anarchistics ways.

Theoretically, this study finds a thesis stating that capital penetration in Brondong have given a way for rational relation pattern's. Such rationality heightens fishermen's capability to take "position" for bargaining in political process as an effort to realize their interests.

This study thus delineates implications which theoretically sharpen the weakness of key concepts in dialetical materialism theory.

x